

BAB II

***BLOOD DIAMOND* DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH DAN SANKSI INTERNASIONAL**

Kebijakan pengusulan pencabutan sanksi merupakan ujung dari rentetan situasi yang terjadi tidak hanya di Rusia saja tetapi tentunya juga di Republik Afrika Tengah, maka dari itu perlu dipahami rangkaian situasi yang terjadi meliputi konflik perang saudara yang menciptakan adanya berlian konflik sampai keterlibatan Rusia dalam konflik di Republik Afrika Tengah. Bab ini akan mendeskripsikan situasi berlian konflik di Republik Afrika tengah, mekanisme kerja *Kimberley Process Certification Scheme*, serta sanksi internasional kepada Republik Afrika Tengah dan Rusia.

Bagian pertama bab ini akan membahas mengenai situasi negara Republik Afrika Tengah secara umum, lalu membahas bagaimana terjadinya eskalasi konflik perang saudara di Republik Afrika Tengah, dan perindustrian berlian serta berlian konflik yang ada. Bagian kedua akan membahas mengenai *Kimberley Process* dari pembentukan, keanggotaan, kepemimpinan, sampai cara kerjanya. Bagian ketiga akan membahas mengenai sanksi internasional yang diberikan kepada Republik Afrika Tengah. serta dampak dan respon sanksi balik dari Rusia terhadap negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi. Bagian terakhir akan membahas mengenai sanksi internasional yang diterima oleh Rusia beserta dampak dari sanksi dan respon sanksi balasan yang diberikan.

2.1. Berlian di Republik Afrika Tengah

2.1.1. Republik Afrika Tengah

Republik Afrika Tengah merupakan negara *landlock* yang terletak tepat di tengah wilayah Afrika Tengah, negara ini beribukota di Bangui dan memiliki luas total sebesar 622.984 km² serta berbatasan dengan negara Chad di sebelah utara,

Sudan di timur laut, Sudan Selatan di tenggara, Republik Demokratik Kongo di Barat daya, dan Kamerun di barat. Negara ini meraih kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 12 Agustus 1960, dan memiliki sistem kepemimpinan semi-presidensial dengan bentuk pemerintahan republik, Faustin-Archange Touadéra telah menjabat sebagai presiden sejak 30 Maret 2016 dengan Firmin Ngrébada menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 25 Februari 2019. Republik Afrika Tengah merupakan salah satu negara termiskin di dunia dimana berdasarkan data IMF tahun 2020, total GDP (PPP) negara ini berada pada urutan ke-162 dari 187 negara dengan total 4.270 juta USD. Negara ini memiliki populasi berjumlah 4.666.368 jiwa berdasarkan estimasi pada tahun 2018 dengan rata-rata GDP per kapitanya adalah 823 USD, maka berdasarkan data tersebut Republik Afrika Tengah dikategorikan sebagai salah satu negara kurang berkembang (*Least Developed Countries*).

Perekonomian Republik Afrika Tengah juga dianggap sebagai salah satu yang minim perkembangan. Menurut data OEC, Republik Afrika Tengah memiliki jumlah total ekspor sebesar 99,4 juta USD namun memiliki jumlah total nilai impor sebesar 213 juta USD sehingga menghasilkan neraca perdagangan negatif sebesar -113 juta USD. Negara ini sangat mengandalkan terhadap sektor pertambangannya seperti emas dan berlian serta uranium untuk mendapatkan pendapatan, walaupun juga ikut ditopang dengan pendapatan dari hasil perhutanan seperti kayu kasar dan kayu olahan. Karena keterpurukan ekonominya maka hal tersebut menciptakan masalah lain dimana menurut data dari *Global Hunger Index* tahun 2019, Republik Afrika Tengah masuk dalam kategori sangat mengkhawatirkan (*extremely alarming*) karena 53,6% penduduknya menderita kelaparan. Maka dari itu, Republik Afrika Tengah sangat bergantung kepada bantuan dari luar negeri dan bantuan dari berbagai organisasi non-pemerintah, karena pada 2019 sendiri estimasi nilai bantuan yang diberikan kepada Republik Afrika Tengah mencapai 100 Juta USD dimana mayoritas bentuk bantuannya berupa bantuan kemanusiaan.

Permasalahan lain di Republik Afrika Tengah adalah ketidakstabilan politik yang kerap terjadi dengan diawali pada aksi kudeta setelah lima tahun kemerdekaan

negara oleh Jean-Bédél Bokassa dimana Bokassa tidak hanya mengganti nama negaranya menjadi Kekaisaran Afrika Tengah (*Central African Empire*) tetapi juga menjadikan sistem negara menjadi monarki dan menjadikan dirinya sebagai penguasa negara seumur hidupnya, sampai akhirnya pada 1979 Perancis menggulingkan pemerintahan Bokassa dan mengembalikan sistem negara seperti yang sebelumnya serta menyerahkan kepemimpinan negara terhadap presiden sebelumnya yaitu David Dacko, sampai akhirnya pada 1981 terdapat upaya kudeta yang sukses dilancarkan oleh Andre Kolingba. Setelah pergantian abad, terjadi lagi upaya untuk menggulingkan kepemimpinan dengan kudeta pada 2001 namun upaya tersebut gagal walaupun upaya berikutnya pada 2003 menuai keberhasilan dimana kepemimpinan Ange-Félix Patassé digantikan oleh Francois Bozizé, namun tidak lama berselang terjadi perang saudara yang dinamakan *Central African Republic Bush War* dari 2004 sampai 2007, dimana perang ini terjadi karena pasukan yang menentang Bozizé mengangkat senjata melawan pemerintahannya (Polgreen, 2006), pada akhirnya konflik ini memakan ratusan korban jiwa sipil dan menelantarkan 212.000 penduduk (Human Rights Watch, 2007). Tetapi konflik tersebut bukanlah akhir dari ketidakstabilan politik di Republik Afrika Tengah karena terjadi lagi konflik bersenjata pada Perang Saudara Republik Afrika Tengah yang mulai terjadi pada 2012.

2.1.2. Eskalasi Konflik Perang Saudara di Republik Afrika Tengah

Konflik *Central African Republic Bush War* dapat berakhir setelah dibuatnya dibuat perjanjian perdamaian pada 2007, dan tidak lama setelahnya muncul sebuah aliansi bernama *Séléka* yang merupakan sebuah koalisi yang mayoritasnya terdiri atas kelompok Muslim. Pada 2012, *Séléka* menuduh pemerintah karena gagal mematuhi perjanjian perdamaian karena masih terdapat berbagai pelanggaran politik seperti penyiksaan dan eksekusi ilegal (Sayare, 2013), maka sebagai responnya kelompok ini melancarkan aksi pemberontakan pada 10 Desember 2012 dan secara efektif memulai Perang Sipil Republik Afrika Tengah. *Séléka* berhasil merebut

berbagai kota pada akhir 2012 sampai akhirnya sukses merebut ibukota Bangui pada Maret 2013 dimana presiden saat itu yaitu François Bozizé melarikan diri ke Republik Demokratik Kongo (Al Jazeera, 2013) sehingga memungkinkan pemimpin pasukan *Séléka* bernama Michel Djotodia untuk dapat mendeklarasikan dirinya sebagai presiden (RFI, 2013). Sebuah aliansi bernama *Anti-balaka* dibentuk sebagai respon terhadap pemberontakan dan kekejaman yang telah dilakukan oleh kelompok *Séléka*, dimana *Anti-balaka* sendiri secara mayoritas terdiri atas kelompok Kristen sehingga menciptakan elemen perang antar agama atau kekerasan sektarian dalam konflik perang sipil ini. Pada bulan September, pasukan *Anti-balaka* melakukan serangan balas dendam terhadap sebagian besar penduduk Muslim sehingga membuat puluhan ribu penduduk mengungsi ke daerah-daerah sebelah utara yang dikuasai oleh *Séléka*. Dan Pada bulan yang sama, aliansi *Séléka* dibubarkan oleh Djotodia karena telah terpecah belah, dan karena situasi kondusif yang tidak kunjung mereda maka Michel Djotodia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Catherine Samba-Panza, tetapi pengunduran dan pembubaran aliansi tersebut sama sekali tidak mengarahkan terhadap perdamaian karena banyak dari mantan anggota *Séléka* yang disebut sebagai *ex-Séléka* melakukan serangan balasan terhadap *Anti-balaka* sehingga membuat skala konflik semakin besar dan menjerumuskan Republik Afrika Tengah ke kondisi kekacauan dan krisis kemanusiaan, dimana PBB memperingatkan bahwa terdapat potensi terjadinya genosida dalam konflik bersenjata ini (BBC, 2013). Hingga pada bulan Juli 2014, terdapat perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh perwakilan kelompok *ex-Séléka* dan *Anti-balaka* di Brazzaville, dan menciptakan terpisahnya negara secara de facto dimana *Anti-balaka* menguasai area selatan dan barat, sementara *ex-Séléka* menguasai area utara dan timur. Serta pada 2014, aliansi *ex-Seleka* terpecah karena perbedaan pendapat diantara petingginya menjadi “*The Popular Front for the Rebirth (or Renaissance) of Central African Republic*” atau disingkat sebagai *FPRC* yang dipimpin oleh Noureddine Adam dan “*Union for Peace in the Central African Republic*” atau disingkat sebagai *UPC* yang dipimpin oleh Ali Darassa, *FPRC* yang

dipimpin oleh Adam kemudian mendeklarasikan berdirinya *Republic of Logone* yang bertempat di dalam teritori Republik Afrika Tengah dan beribukota di Kaga-Bandoro, lalu terbentuk lagi kelompok bersenjata baru bernama “*Central African Patriotic Movement*” (*MPC*) yang diprakarsai oleh Mahamat Al Khatim (Larcher, 2017). Selanjutnya telah terdapat perjanjian pembagian wilayah secara *de facto* yang menyebabkan jeda pada pertempuran antara kelompok Muslim dan Kristen, tetapi pertempuran antara berbagai faksi *eks-Seleka* yang terpecah masih berlanjut. Pada pemerintahan Presiden Faustin-Archange Touadéra yang mulai sejak 2016, pemerintah telah menguasai area ibukota Bangui dan pemerintah juga telah melakukan upaya pelucutan senjata kepada para pemberontak untuk menenangkan keadaan namun upaya tersebut pada akhirnya diboikot oleh para pemberontak. Sementara itu, situasi tanpa adanya hukum (*lawlessness*) di luar teritori pemerintah memungkinkan para kelompok bersenjata untuk tetap melakukan dan bahkan meningkatkan intensitas pertempuran serta brutalitas di provinsi tengah, barat, dan timur Republik Afrika Tengah. Dalam upaya penegakkan perdamaianya, konflik perang saudara di Republik Afrika Tengah telah melibatkan *MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic)*, *MICOPAX (Economic Community of Central African States)*, dan *EUFOR RCA (European Union Military Operation in the Central African Republic)*, serta ikut melibatkan pasukan militer Perancis sejak tahun 2013 dan pasukan militer Afrika Selatan sejak tahun 2012.

Walaupun tidak terdapat jumlah pastinya namun konflik tersebut telah memakan setidaknya ribuan korban jiwa baik kombatan dan masyarakat sipil dengan puncaknya terjadi pada tahun 2013 dimana angka kematian pada tahun tersebut mencapai antara 2.286 sampai 2.396, sementara sampai 2017 terdapat lebih dari 1,1 juta penduduk ($\pm 1/5$ populasi Republik Afrika Tengah) yang terlantar akibat aksi peperangan dan penjarahan yang dilakukan oleh para pemberontak (Bax, 2017). Konflik ini juga tentunya mengakibatkan kehancuran ekonomi dan menyebabkan hampir 75% penduduk dalam kemiskinan (CFR, 2020), dimana 2,5 juta

penduduknya membutuhkan bantuan kemanusiaan tetapi walaupun terdapat organisasi non-pemerintah dan organisasi kemanusiaan yang terus berupaya membantu, tetap saja situasi ketidakamanan dan kurangnya dana memperlambat dan mengancam kehadiran, logistik, serta operasi mereka secara keseluruhan (UN Security Council, 2014).

Mengenai HAM, konflik ini telah menciptakan krisis kemanusiaan. Karena terdapatnya persekusi agama (*religious cleansing*) dimana dinamika konflik mengubah jalannya konflik menjadi konflik sektarian sehingga masyarakat dengan agama lain menjadi sasaran oleh kedua pihak pemberontak, dimana peperangan tidak hanya saling melibatkan kelompok kombatan yang berbeda keyakinan tetapi dilengkapi juga dengan penyerangan kota dan pedesaan serta penembakan masyarakat sipil, pembunuhan orang tidak bersalah, penjarahan benda kepemilikan warga, pembakaran rumah dan tempat ibadah, dan pemerkosaan terhadap wanita yang kerap terjadi selama jalannya konflik yang kebanyakan terjadi hanya karena perbedaan agama. Lalu terdapat juga kekerasan antar etnis (*ethnic violence*) dalam konflik perang saudara dimana etnis *Gula* dan suku *Runga* yang keduanya merupakan bagian dari kelompok *FPRC* menyerang etnis *Fulani* yang merupakan bagian besar dari kelompok *UPC* serta terdapat juga konflik antara etnis *Fulani* yang melawan etnis *Kara* yang merupakan bagian dari "*Movement of Central African Liberators for Justice*" (*MLCJ*). Karena situasi yang semakin memburuk, salah satu pejabat senior PBB mengatakan bahwa terdapat tanda-tanda peringatan dini akan terjadinya genosida (DW, 2017). Selain itu terdapat juga pelanggaran HAM dalam bentuk keberadaan tentara anak-anak dimana jumlah personilnya sempat mencapai angka 10.000, pada umumnya anak-anak tersebut bergabung atas kemauan mereka sendiri atau karena perintah dari keluarga mereka tetapi juga dilengkapi karena berbagai motivasi utama seperti pembalasan dendam setelah kehilangan anggota keluarga, kebutuhan akan perlindungan, dan rasa kewajiban untuk membela komunitasnya, serta buruknya pendidikan di negara ini tentunya memainkan peran

dalam banyaknya jumlah anak-anak yang bergabung untuk mengangkat senjata (Child Soldiers International, 2016).

2.1.3. “Blood Diamond” di Republik Afrika Tengah

Republik Afrika Tengah memiliki banyak daerah yang kaya akan hal tersebut sehingga maka kondisi ini tentunya akan menguntungkan para kelompok pemberontak, dengan salah satunya di daerah Sam-Ouandja yang dikuasai oleh salah satu grup pemberontak dimana para pemberontak tersebut memeras penambang setempat untuk bekerja lebih keras menggali setiap lubang dengan bayaran sangat kecil yang hanya cukup untuk membuat mereka tetap hidup dan terus bekerja yang dimana berlian hasil galian tersebut dijual di desa setempat dengan keuntungan yang besar, dan setelah itu pembeli berlian tersebut mengirim berlian dari daerah konflik ke Bangui yang merupakan daerah kekuasaan pemerintah sehingga dapat dijual kembali ke pembeli dari Eropa atau Timur Tengah, walaupun terdapat rute lain dimana berlian diselundupkan ke negara tetangga yang tidak mendapatkan sanksi dari *Kimberley Process* (Dalby, 2011). Diluar contoh tersebut, terdapat banyak tambang lainnya yang dikuasai oleh para grup pemberontak dimana para penambang (yang kebanyakan merupakan warga sekitar) menderita penyiksaan, penyerangan, eksploitasi, dan berbagai pelanggaran ham lainnya seperti pemaksaan bekerja pada kondisi kerja yang tidak aman tanpa adanya perlindungan sehingga tidak jarang terdapat korban jatuh karena dinding lubang pada tambang yang runtuh dan penyelam pertambangan yang tidak muncul kembali ke permukaan, serta terdapat bentuk pemaksaan kerja dalam kondisi yang tidak sehat sehingga tidak jarang mengakibatkan hernia, kelelahan fisik, malaria, dan berbagai penyakit parasit lainnya. Kekhawatiran lain juga ditujukan kepada anak-anak karena mereka juga ikut dipaksa untuk menambang di tambang berlian dibawah kepemilikan grup pemberontak. Keadaan konflik dan berpindahnya teritori kekuasaan tidak menyebabkan aktivitas di tambang berlian untuk berhenti tetapi justru semakin aktif

karena gambar dari satelit menunjukkan bahwa peningkatan produksi di pertambangan berlian terlihat semakin aktif.

Berdasarkan laporan PBB, dari Mei 2013 sampai penghujung 2014 total 140.000 karat berlian yang bernilai 24 juta USD meninggalkan Republik Afrika Selatan secara ilegal, maka banyaknya kuantitas berlian konflik yang berhasil terekspor tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat banyak rute yang dapat dilalui oleh berlian sehingga semakin mempermudah proses penyelundupan, dan berikut adalah beberapa rute yang digunakan untuk menyelundupkan berlian konflik. Pertama adalah melalui Bandara Bangui dimana berlian yang berasal dari luar area kekuasaan pemerintah diselundupkan masuk ke area pemerintah lalu disertakan ke penerbangan keluar negeri baik secara sembunyi-sembunyi ataupun melalui penyuapan terhadap petugas berwenang. Kedua adalah melalui perbatasan Kamerun dimana perusahaan-perusahaan di negara ini kerap membeli berlian dari area konflik lalu mengekspornya keluar benua karena mudahnya mendapatkan sertifikat palsu serta keterbatasan pengetahuan oleh para petugas bea cukai. Ketiga adalah melalui perbatasan Republik Demokratik Kongo dimana negara ini telah rentan terhadap barang selundupan dari area konflik karena kontrol internal yang buruk. Keempat adalah melalui perbatasan Chad dan Sudan karena kedua negara tersebut tidak masuk sebagai anggota *Kimberley Process*. Sementara destinasi favorit dari berlian yang berhasil terekspor adalah Dubai, Uni Emirat Arab dan Antwerp, Belgia (Shah, 2015).

2.2. Kimberley Process Certification Scheme

2.2.1. Tujuan Pembentukan, Keanggotaan, dan Kepemimpinan

Kimberley Process Certification Scheme dibentuk pada tahun 2003 di Kimberley, Afrika Selatan oleh negara-negara penghasil berlian di Afrika dimana pendiriannya didukung atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB melalui resolusi A/RES/55/56 yang bertujuan untuk mendukung adanya proses sertifikasi dalam berlian tambang, lalu dilanjutkan dalam resolusi 1459 yang fokus pada dukungan kuat PBB terhadap pembentukan *Kimberley Process Certification Scheme*.

Kimberley Process sendiri merupakan inisiatif bersama dari para pemerintah negara, aktor industri berlian internasional, dan masyarakat sipil yang bertujuan untuk memberhentikan perdagangan berlian konflik yang digunakan oleh para gerakan pemberontak yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan sah. Keanggotaan *Kimberley Process* meliputi negara dan organisasi ekonomi integrasi regional yang memiliki hak dagang atas berlian kasar, pada periode 2020 *Kimberley Process* memiliki 55 peserta yang mewakili 82 negara, dimana negara-negara anggota Uni Eropa dihitung sebagai satu peserta yaitu *European Commission* (*Kimberley Process*, 2020).



List of Participants – status 2020

States and regional economic integration organizations, with the exception of those indicated with an asterisk (*), meet the minimum requirements of the Kimberley Process Certification Scheme are:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Angola | 29. Lesotho |
| 2. Armenia | 30. Liberia |
| 3. Australia | 31. Malaysia |
| 4. Bangladesh | 32. Mali |
| 5. Belarus | 33. Mauritius |
| 6. Botswana | 34. Mexico |
| 7. Brazil | 35. Namibia |
| 8. Cambodia | 36. New Zealand |
| 9. Cameroon | 37. Norway |
| 10. Canada | 38. Panama |
| 11. Central African Republic* | 39. Russian Federation |
| 12. China, People's Republic of | 40. Sierra Leone |
| 13. Congo, Democratic Republic of | 41. Singapore |
| 14. Congo, Republic of | 42. South Africa |
| 15. European Union** | 43. Sri Lanka |
| 16. Gabon | 44. Swaziland |
| 17. Ghana | 45. Switzerland |
| 18. Guinea | 46. Tanzania |
| 19. Guyana | 47. Thailand |
| 20. India | 48. Togo |
| 21. Indonesia | 49. Turkey |
| 22. Israel | 50. Ukraine |
| 23. Ivory Coast | 51. United Arab Emirates |
| 24. Japan, | 52. United States of America |
| 25. Kazakhstan, Republic of | 53. Venezuela |
| 26. Korea, Republic of | 54. Vietnam |
| 27. Lao, Democratic Republic of | 55. Zimbabwe |
| 28. Lebanon | |

NOTE: The rough diamond-trading entity of Chinese Taipei has also met the minimum requirements of the KPCS.

* Consistent with the Administrative Decision on Resumption of Exports of Rough Diamonds from the Central African Republic (July 2015).

** During the transition period, the United Kingdom is treated as a Member State of the Union for the purposes of the Kimberley Process Certification Scheme. The transition period starts on 1 February 2020 and ends on 31 December 2020.

Alexey V. Moiseev - KP Chair 2020

Dated: 01/02/2020

Gambar 2.1: Daftar peserta Kimberley Process periode 2020 (Kimberley Process, 2020)

Kimberley Process diketuai oleh *chair* dengan wakil *vice-chair* yang keduanya menduduki jabatan tersebut selama periode satu tahun, pada periode selanjutnya *vice-chair* secara otomatis maju menjadi *chair* dan akan diadakan pemilihan (secara voting) untuk memilih *vice chair*. Tugas utama dari Chair adalah mengawasi seluruh pelaksanaan program *Kimberley Process Certification Scheme*

beserta mengawasi operasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja dan komite, tugas selanjutnya adalah menangani penerimaan peserta baru serta memeriksa kelayakan peserta aktif dan jika terdapat peserta yang tidak lagi memenuhi persyaratan maka akan dikeluarkan, lalu mengarahkan tugas dan operasi *ASM (Administrative Support Mechanism)*, melakukan peninjauan dan penilaian terhadap calon *vice-chair*, dan menandatangani Memorium of Understanding. Dalam pelaksanaan tugas tersebut *chair* dibantu oleh komite yang sendirinya terdiri dari mantan *Chair*, perwakilan dari *World Diamond Council (WDC)*, dan koalisi masyarakat sipil. *Kimberley Process* memiliki tujuh kelompok kerja yang terdiri dari kelompok kerja ahli berlian (WGDE), kelompok kerja monitoring (WGM), kelompok kerja statistik (WGS), kelompok kerja produksi artisanal dan alluvial (WGAAP), komite partisipasi dan kepemimpinan (CPC), komite peraturan dan prosedur (CRP), dan komite ad hoc mengenai reformasi dan peninjauan (AHCRR) (Kimberley Process, 2020).

2.2.2. Mekanisme Kerja

Untuk menjamin setiap berlian yang diperjual-belikan tidak berasal dari pertambangan area konflik, maka setiap paket berlian harus dilengkapi dengan Sertifikat *Kimberley Process* sebagai jaminan bebas-konflik dan dapat diperjualbelikan atau ekspor-impor secara legal.



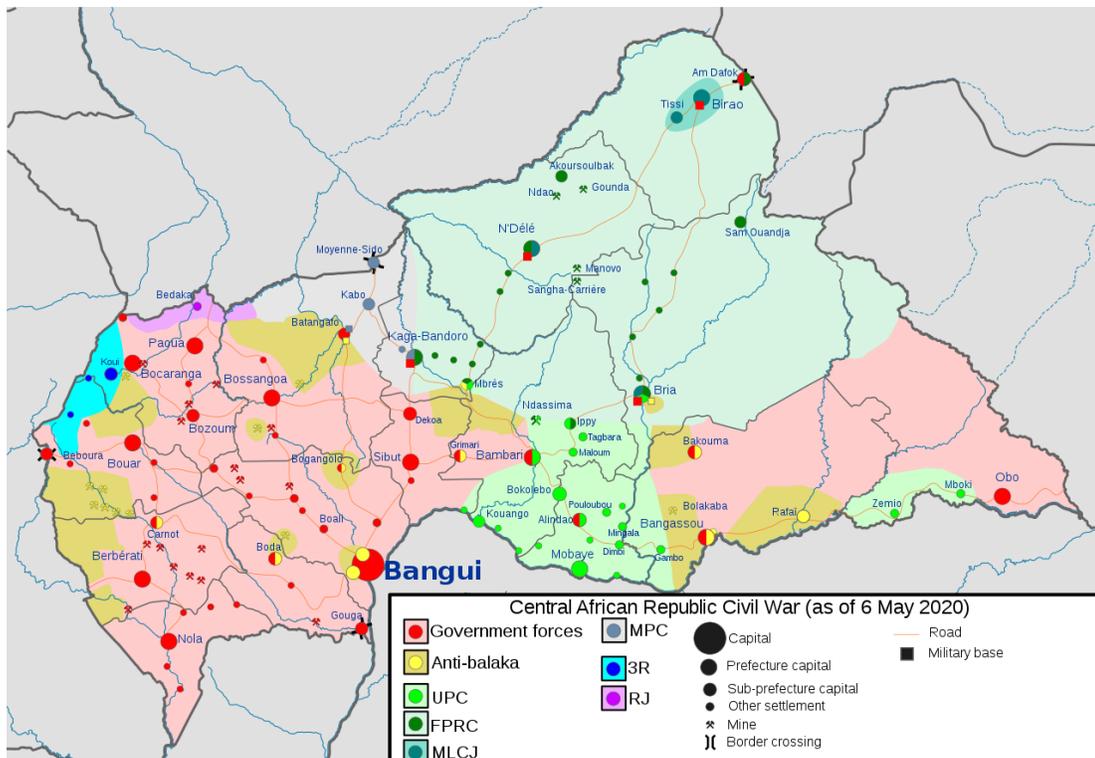
Gambar 2.2: Salah satu contoh sertifikat Kimberley Process (The Raw Stone, 2018)

Setiap anggota peserta *Kimberley Process* sendiri diwajibkan untuk memenuhi empat ketentuan. Pertama yaitu, memenuhi ‘persyaratan minimum’ dan menetapkan undang-undang, lembaga, dan kontrol ekspor/impor nasional. Kedua, memastikan transparansi dan pertukaran data statistik penting antara sesama anggota peserta. Ketiga, berdagang hanya dengan sesama negara anggota peserta yang sama-sama memenuhi dasar-dasar perjanjian yang telah ditetapkan. Dan Keempat, memberikan sertifikasi terhadap pengiriman berlian sebagai bebas konflik dan juga memberikan sertifikasi pendukung (Kimberley Process, 2020). Maka dari itu, setiap negara anggota wajib untuk memeriksa setiap berlian yang akan diperdagangkan dan memastikan berlian tersebut tidak berasal dari daerah yang sedang berkonflik, berlian yang lulus inspeksi akan mendapatkan sertifikat *Kimberley Process Certificate* yang berarti bahwa berlian tersebut bebas-konflik (*conflict free*) dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara internasional dimana sertifikat tersebut akan selalu bersama berlian dan diinspeksi pada setiap bea cukai dan pemasok berlian resmi, sementara berlian yang tidak memiliki *Kimberley Process certificate* tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan oleh negara-negara peserta *Kimberley Process* dan dianggap sebagai barang gelap. Setiap negara peserta wajib untuk mematuhi dan menerapkan peraturan serta sanksi dari arahan *Kimberley Process*, maka dari itu jika sanksi diterapkan kepada sebuah negara maka setiap negara peserta wajib mengikutinya sesuai dengan komitmen keanggotaan masing-masing negara yang masuk sebagai peserta *Kimberley Process* (Kimberley Process, 2020). *Kimberley Process* juga beroperasi berdasarkan prinsip konsensus atau mufakat dimana semua keputusan diambil saat rapat paripurna atau melalui prosedur tertulis dengan suara yang bulat dari semua anggotanya.

2.3. Sanksi Internasional Kepada Republik Afrika Tengah

2.3.1. Sanksi berlian kepada Republik Afrika Tengah

Pada 23 Mei 2013, setelah disetujui oleh negara-negara peserta tanpa adanya pihak yang keberatan maka sanksi sementara dijatuhkan kepada Republik Afrika Tengah karena telah memenuhi persyaratan yang ada pada kebijakan dan peraturan (Kimberley Process, 2013). Sanksi tersebut berfungsi untuk menanggukkan aktivitas ekspor berlian yang berasal dari seluruh daerah di Republik Afrika Tengah, menurut data yang dimiliki *Kimberley Process*, total ekspor resmi berlian dari Republik Afrika Tengah pada 2012 sebanyak 371.916,62 karat bernilai 62 juta USD dengan total 100 aktivitas ekspor sementara pada tahun 2013 sampai 2015 tidak terdapat aktivitas ekspor secara resmi sama sekali karena menunjukkan angka 0 USD dan 0 karat. Tetapi pada 2016, sanksi larangan ekspor tersebut diangkat secara sebagian (*partially lifted*) (Ivanova & Donova, 2020).



Gambar 2.3. Berlian yang berasal area berwarna merah dapat diperdagangkan secara legal, sementara berlian yang berasal dari luar area berwarna merah tidak diperbolehkan untuk diekspor (Dukhan, 2018)

Berdasarkan pengangkatan sanksi secara parsial tersebut, berlian yang diperbolehkan untuk diekspor hanya berlaku pada berlian yang penambangannya berasal dari tambang di area pemerintah, data *Kimberley Process* menunjukkan bahwa pada 2016 terdapat 4 aktivitas ekspor dengan total 10.957,25 karat bernilai 1,7 juta USD, pada 2017 angka tersebut naik menjadi 18 aktivitas ekspor dengan total 47.640,02 karat bernilai 6,5 juta USD, lalu pada 2018 angka tersebut kian naik menjadi 32 aktivitas ekspor dengan total 91.814,87 karat bernilai 10,1 juta USD (Kimberley Process, 2019).

2.3.2 Sanksi Militer Kepada Republik Afrika Tengah

Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi kepada pemerintah Republik Afrika Tengah dengan bentuk sanksi militer dimana sejak mulainya perang saudara pada 2013, negara *landlocked* ini dilarang untuk membeli senjata, amunisi, dan peralatan militer. Tetapi pasukan militer Republik Afrika Tengah sendiri masih diperbolehkan untuk menerima bantuan senjata dari pihak eksternal, hanya jika mendapatkan izin dari komite sanksi yang berkaitan (SIPRI, 2020). Yang dimana status Rusia sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB memperbolehkan negara tersebut untuk memberikan bantuan militer kepada pasukan pemerintah Republik Afrika Tengah, dengan bantuan militer tersebut berupa persenjataan berlaras kecil serta diikuti dengan pengiriman personil medis dan instruktur pasukan bersenjata untuk melatih para pasukan militer Republik Afrika Tengah (Ramani, 2021).

2.4. Upaya Pencabutan Sanksi Berlian Republik Afrika Tengah oleh Rusia

Secara lebih lanjut, argumen utama dari Rusia atas pengajuan pencabutan sanksi adalah karena pembatasan tersebut tidak mempengaruhi total produksi berlian dari Republik Afrika Tengah, dan justru meningkatkan jumlah berlian yang dijual secara ilegal, serta menghasilkan keuntungan bagi para kelompok militan bukannya masyarakat (Reuters, 2020). Sebelum dijatuhkannya sanksi, tercatat sebanyak 350.000 karat berlian yang ditambang secara resmi, tetapi setelah dijatuhkannya

sanksi tersebut jumlah produksi penambangan berlian secara resmi hanya mencapai 39.000 karat, sehingga Rusia percaya bahwa celah dalam jumlah tersebut masih tetap ditambang dan dijual secara ilegal (RIA Novosti, 2019). Yang dimana intensi pencabutan sanksi terhadap Republik Afrika Tengah dari Rusia ini disambut baik dan didukung oleh India (ketua *Kimberley Process* pada tahun periode 2019), Uni Emirat Arab, Tiongkok, dan 13 negara anggota Uni Afrika (Glazunova, 2020).

Setelah mengumumkan niatnya untuk mencabut sanksi berlian dari Republik Afrika Tengah, dan setelah resmi menjabat sebagai *chair* atau pimpinan dari lembaga *Kimberley Process Certification Scheme* periode 2020, Rusia memperkenalkan sebuah *road map* atas apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Republik Afrika Tengah dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat memvalidasi perdagangan berlian, karena walaupun menjabat sebagai pimpinan, Rusia tidak serta merta dapat langsung mencabut sanksi *Kimberley Process* terhadap Republik Afrika Tengah yang sudah ditempatkan sejak bulan Mei tahun 2013, karena proses pencabutan sanksi ini dapat memakan waktu bertahun-tahun dan merupakan upaya kolektif yang melibatkan baik Rusia dan Republik Afrika Tengah (TASS, 2020). Salah satu bagian terpenting dari *road map* tersebut adalah pengenalan mekanisme monitoring baru yang dapat membantu pihak-pihak yang terlibat di Republik Afrika Tengah untuk dapat beroperasi secara sah dan meminimalkan resiko perdagangan ilegal, karena masih banyaknya angka perdagangan/penyelundupan ilegal walaupun setelah dijatuhkannya sanksi itu sendiri (The Diamond Loupe, 2020). Selanjutnya, Moiseyev menyampaikan bahwa Rusia akan berupaya untuk mendefinisikan ulang definisi utama dari *Blood Diamond*, karena definisi resmi yang masih digunakan oleh *Kimberley Process* dinilai terlalu sempit dan berpotensi untuk merugikan semua pihak yang terlibat dalam penambangan berlian, terlebih lagi mereka yang menambang di negara berkonflik tetapi tidak terlibat dalam konflik perang saudara (The Diamond Loupe, 2020).

Dan untuk menjamin legalitas penambangan dan perdagangan berlian di Republik Afrika Tengah kedepannya, Rusia mengajukan tiga proposal kebijakan

yang dapat diterapkan *Kimberley Process* terhadap Republik Afrika Tengah, yang pertama adalah pengembangan lebih lanjut atas sistem kontrol internal, kedua adalah keterlibatan negara-negara tetangga dari Republik Afrika Tengah dalam saling menjaga perbatasannya dan mencegah aktivitas penyelundupan berlian lintas perbatasan negara, serta ketiga adalah didirikannya tim monitoring independen dari *Kimberley Process* (Ministry of Finance of Russia, 2021). Lalu setelah diselenggarakannya rapat paripurna antara negara-negara anggota *Kimberley Process* pada bulan November 2021, Rusia berhasil mendorong dan kedepannya memfasilitasi pelaksanaan “*review mission*” ke Republik Afrika Tengah untuk kembali meninjau dan menilai situasi serta kepatuhan terhadap persyaratan legislasi perdagangan berlian sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh *Kimberley Process*, yang dimana hal tersebut dapat dilakukan untuk kembali mempertimbangkan keputusan pengangkatan sanksi parsial terhadap Republik Afrika Tengah, tentunya jika seluruh aspek yang ditinjau dapat memenuhi persyaratan minimum (Ministry of Finance of Russia, 2021). Yang dimana pada akhirnya program-program kerja yang telah disebutkan akan terus dilanjutkan oleh Botswana sebagai penerus ketua *Kimberley Process* setelah Rusia mengakhiri periodenya pada akhir tahun 2021.

2.5. Sanksi Internasional Terhadap Rusia

2.5.1. Sanksi Kepada Rusia Terkait Aneksasi Krimea

Rangkaian sanksi internasional mulai dijatuhkan kepada Rusia setelah dilakukannya upaya aneksasi pada area Krimea yang mulai terjadi pada akhir Februari 2014, sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan utamanya oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Australia, serta negara-negara lainnya. Terkait dengan peristiwa tersebut, respon sanksi terhadap Rusia ini dikeluarkan dalam tiga ronde.

Amerika Serikat mengawali penjatuhan sanksi pada 6 Maret 2014 dengan pembekuan aset dan larangan perjalanan pada beberapa individu yang terlibat pada aneksasi Krimea (Obama White House, 2014), lalu diikuti oleh Uni Eropa dengan

sanksi berupa larangan perjalanan kepada 21 individu yang terlibat dalam upaya aneksasi Krimea (Official Journal of the European Union, 2014). Jepang ikut memberikan sanksi kepada Rusia dengan penangguhan terhadap potensi prospek kerjasama militer, eksplorasi luar-angkasa, investasi, dan penggunaan visa (Fox News, 2014). Australia mulai menjatuhkan sanksi kepada Rusia yang menargetkan terhadap sektor finansial dan larangan perjalanan kepada pihak yang terlibat pada aneksasi Krimea (ABC, 2014).

Ronde kedua sanksi mulai diberikan pada tanggal 10 April 2014 dimana Majelis Eropa menangguhkan hak voting kepada delegasi Rusia (Harding, 2014). Serta pada tanggal 28 April, pemerintahan Barack Obama menjatuhkan larangan kegiatan berbisnis dari Amerika Serikat kepada 7 pejabat pemerintah Russia dan 17 perusahaan Rusia (Haaretz, 2014), dan pada tanggal yang sama Uni Eropa menambahkan daftar larangan perjalanan kepada 15 individu (International Trade Compliance, 2014).

Ronde ketiga sanksi dijatuhkan akibat eskalasi perang di Donbass, Ukraina pada pertengahan 2014. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi sektoral terhadap beberapa bank Rusia yaitu Gazprombank, Vneshtorgbank, Russian Agricultural Bank, dan Vnesheconombank serta pada dua perusahaan energi yaitu Rosneft dan Novatek (SKULD), serta pada Desember 2014 Amerika Serikat melarang ekspor barang dan jasa ke wilayah Krimea (Channel News Asia, 2014). Uni Eropa menjatuhkan sanksinya kepada 151 individu dan 37 entitas serta menjatuhkan embargo pada persenjataan dan material terkait, embargo pada barang multi-guna, pelarangan terhadap impor persenjataan dari Rusia, dan pembatasan ekspor peralatan pada industri perminyakan (Official Journal of the European Union, 2014). Kanada ikut menjatuhkan sanksi pada Rusia yang ditargetkan terhadap 40 individu dan 31 entitas (Prime Minister of Canada, 2015), serta sanksi lain yang berfokus pada sektor militer, energi, dan finansial (Reuters, 2014). Jepang membekukan aset pada 40 individu dan kelompok yang mendukung separasi Krimea dari Ukraina serta membatasi impor barang-barang dari Krimea, lalu diikuti dengan pemberhentian

pendanaan terhadap sejumlah proyek di Rusia, perwakilan Jepang juga menyatakan bahwa sanksi yang diberikan sejalan dengan langkah yang diambil oleh Uni Eropa (ABC News, 2014). Norwegia memberikan sanksi dengan melarang pemberian pinjaman dalam berbagai bentuk terhadap bank milik pemerintah Rusia, pelarangan ekspor peralatan bersenjata, dan melarang adanya transfer teknologi dan asistensi pada sektor perminyakan Rusia (Mohsin, 2014). Swiss memberikan sanksi terhadap beberapa individu baik dari Rusia dan Ukraina yang pro-Rusia serta kedepannya mengadopsi sanksi yang serupa dengan Uni Eropa seperti melarang investasi dan ekspor-impor pada sektor persenjataan dan perminyakan di area Krimea dan Sevastopol (The Federal Council, 2014). Sementara pemerintah Ukraina memberikan sanksi terhadap lebih dari 388 individu dan 105 perusahaan Rusia (The Ukrainian Week, 2017).

Beberapa tahun kemudian pada Januari 2018, Rusia menyelesaikan pembangunan “Jembatan Krimea” yang menghubungkan antara Krasnodar dengan Krimea yang dimana pembangunan infrastruktur ini dilihat oleh Uni Eropa sebagai upaya konsolidasi aneksasi ilegal Rusia atas teritori Ukraina sehingga perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa berupa pembekuan aset (Herszenhorn, 2018).

2.5.2. Sanksi Kepada Rusia yang Tidak Terkait dengan Aneksasi Krimea

Sebelum berawalnya peristiwa aneksasi Krimea, Amerika Serikat telah menetapkan sanksi internasional terhadap Rusia dalam bentuk *Magnitsky Act* yang ditujukan untuk menghukum pejabat pemerintah Rusia yang bertanggung jawab atas kematian akuntan pajak Rusia yang bernama Sergei Magnitsky yang meninggal dalam penjara di Moskow pada tahun 2009, yang dimana 18 individu dijatuhi sanksi dengan pelarangan untuk masuk dalam teritori Amerika Serikat dan pelarangan untuk menggunakan jasa bank asal Amerika Serikat (Lally & Englund, 2012).

Selain aneksasi Krimea, Rusia masih tetap berada dibawah bayangan sanksi dari negara-negara lain atas dasar yang berbeda. Salah satu yang pertama adalah

sanksi terkait alegasi intervensi dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, dimana pada 29 Desember 2016 Presiden Obama mengeluarkan sanksi pertama terkait alegasi tersebut dengan penandatanganan perintah eksekutif yang secara resmi menjatuhkan sanksi kepada 4 pejabat GRU (dinas intelijen militer Rusia) beserta FSB (*Federal Security Service*) dan mendeklarasikan *persona non grata* yaitu perintah untuk meninggalkan teritori Amerika Serikat dalam 72 jam terhadap 35 diplomat Rusia yang dicurigai telah melakukan aksi mata-mata, serta mengosongkan dua properti yang dimiliki oleh pemerintah Rusia karena properti tersebut dicurigai menjadi sarang aktivitas mata-mata yang dimana kedua properti tersebut terletak di New York dan Maryland (Mazzetti & Schmidt, 2016). Lalu pada pertengahan 2017, Menteri Luar Negeri Rusia mengklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat menolak untuk menerbitkan visa terhadap diplomat Rusia yang diutus untuk menggantikan para diplomat yang sebelumnya telah diusir (Osborn & Tsvetkova, 2017). Dibawah kepemimpinan Donald Trump, Rusia kembali dijatuhi sanksi atas keterlibatannya pada pemilihan presiden tahun 2016 setelah terbitnya *Mueller Report* dimana pada 15 Maret 2018, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap 19 individu dan 5 entitas Rusia yang berperan sebagai peretas bagi pemerintah Rusia seperti salah satunya adalah *The Internet Research Agency* yang didirikan dan didanai oleh oligark Rusia Yevgeny Prigozhin (Sheth, 2018).

Lalu pada Agustus 2017, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan sejumlah sanksi kepada Iran, Korea Utara, dan Rusia dibawah undang-undang "*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*" (CAATSA) dimana sanksi khususnya yang melingkupi Rusia ini menargetkan pada 1) keamanan siber, 2) proyek minyak mentah, 3) institusi finansial, 4) korupsi, 5) pelanggaran hak asasi manusia, 6) penghindaran/pelanggaran sanksi, 7) transaksi terhadap sektor pertahanan dan intelegensi Rusia, 8) ekspor saluran pipa, 9) privatisasi terhadap perusahaan milik negara oleh pejabat pemerintah Rusia, 10) transaksi persenjataan antara Rusia dan Suriah (Edward, 2017).

Pada 4 Maret 2018 eks agen ganda Rusia yang bekerja untuk Inggris bernama Sergei Skripal dan putrinya Julia yang tinggal di Inggris mengalami percobaan pembunuhan dengan racun Novichok dimana upaya tersebut diduga didalangi oleh pemerintah Rusia. Dan sebagai responnya, 29 negara utamanya negara anggota NATO mengusir sebanyak 149 diplomat Rusia, 60 diantaranya merupakan diplomat dan terduga agen rahasia Rusia yang berada di Amerika Serikat (Collinson & Cohen, 2018).

Pada 6 April 2018, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi pada 7 oligark Rusia dan 12 perusahaan yang dimiliki oleh individu-individu tersebut atas alasan “kegiatan kejahatan di seluruh dunia” yang dimana sanksi ini juga meliputi 17 pejabat pemerintah Rusia serta perusahaan persenjataan Rosoboronexport dan bank milik negara yaitu Russian Financial Corporation Bank (Macias & Calia, 2018).

Pada 27 Agustus 2018, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan sanksi terkait tindakan pengendalian dan peperangan senjata kimia dan biologis dimana Rusia dikenakan berbagai sanksi yang meliputi pelarangan pada ekspor produk dan teknologi militer terkait, penghentian asistensi finansial dari pemerintah Amerika Serikat, pelarangan dalam ekspor barang-barang dan teknologi yang berpotensi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat, serta penghentian pada bantuan asing kepada Rusia (SKULD).

Pada Maret 2019, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada memberikan sanksi terhadap 6 individu dan 8 perusahaan dari industri perkapalan dan persenjataan Rusia akibat insiden di Selat Kerch dimana kapal Rusia melancarkan serangan terhadap kapal angkatan laut Ukraina di Selat Kerch (US Department of the Treasury, 2019).

Pada 20 Agustus 2020, tokoh oposisi pemerintah Rusia dan aktivis anti korupsi bernama Alexei Navalny mengalami upaya pembunuhan dengan racun *Novichok* (jenis racun yang juga digunakan pada upaya pembunuhan Sergei dan Yulia Skripal) pada saat dalam penerbangan dari Tomsk ke Moskow. Sebagai responnya, Uni Eropa dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap direktur FSB dan

lima pejabat pemerintah Rusia lain serta pada Institut Kimia Organik dan Teknologi Negara (GosNIIOKhT) (Baklanov, 2020).

2.6. Kesimpulan

Polemik mengenai legalisasi *blood diamond* di Republik Afrika Tengah timbul akibat adanya konflik perang saudara yang telah bereskalasi sejak 2012 dimana konflik yang masih berjalan sampai penulisan ini terjadi karena adanya perselisihan antara fraksi *Séléka* dan *Anti-balaka*. Akibat konflik tersebut, Republik Afrika Tengah diganjar dengan sanksi militer dari PBB yang mencegah pasukan dari pemerintahan Faustin Touadéra untuk memperoleh peralatan perang sehingga status keamanan dan upaya perlawanan terhadap pemberontakan sangat bergantung terhadap bantuan dari pasukan asing. Sementara terkait dengan berlian konflik, dijatuhkan sanksi pada ekspor berlian oleh *Kimberley Process Certification Scheme* mulai dari tahun 2013, yang dimana *Kimberley Process* merupakan koalisi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan semua yang terlibat dalam industri berlian yang memiliki tujuan utama untuk menjamin agar perdagangan berlian dunia bebas dari campur tangan konflik bersenjata.

Pada 2019, wakil ketua *Kimberley Process* yaitu Rusia mengumumkan niatnya untuk mencabut sanksi berlian terhadap Republik Afrika Tengah secara keseluruhan, hal ini bertepatan dengan posisi Rusia yang akan naik menjadi Ketua *Kimberley Process* pada periode 2020 sampai akhir 2021. Dengan upaya pencabutan sanksi Rusia di panggung *Kimberley Process* meliputi asistensi dan pengenalan mekanisme baru sampai pengajuan peninjauan kembali atas situasi di Republik Afrika Tengah. Senasib dengan Republik Afrika Tengah, Rusia merupakan negara yang juga mendapatkan ganjaran sanksi internasional walaupun dengan motif dan jumlah sanksi yang berbeda dimana sanksi terhadap Rusia diberikan oleh negara-negara Barat utamanya Uni Eropa dan Amerika Serikat akibat aneksasi wilayah Ukraina di Krimea, tuduhan upaya pembunuhan terhadap beberapa figur penting, sampai tuduhan intervensi pada pemilihan presiden Amerika Serikat pada

tahun 2016. Dimana bentuk sanksi ini berkisar dari sanksi ekonomi, sanksi individu, sampai sanksi militer.